

Pendidikan

- o Lulusan SMA Negeri 39 Jakarta pada 198
- o Akademi Militer pada 1990 (dari kecabangan Infanteri (Kopassus) yang disebut pernah menjadi bagian dari Tim Mawar?

Jejak Jabatan

- o Sekretaris Utama BIN berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024.
- o Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan)
- o Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI
- o Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkum).

Pendidikan

- o Universitas Gadjah Mada dengan lulus sebagai Sarjana Ekonomi pada tahun 2000.
- o Master of Business Administration (MBA) di University of Queensland, Australia pada 2005
- o Ph.D bidang ekonomi di University of Caberra Bruce, Australia.

Jejak Jabatan

- o Asisten Deputi Investasi Strategis, Kemenko Marves, bidang Pertambangan dan Investasi.
- o Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (2016–2020), bidang Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis.
- o Komisaris Independen PT Phapros Tbk, ditunjuk lewat RUPST pada 25 Mei 2022 di Jakarta.

PRABOWO GANTI KOMANDAN PENDAPATAN NEGARA

Dirjen Pajak Baru dari Lulusan Tarnus, Bea Cukai Dikomandani Letjen TNI

Teka-teki perombakan para petinggi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sejak akhir pekan santer beredar terjawab sudah. Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo dan Dirjen Bea dan Cukai Askolani diganti. Meski belum resmi dilantik, nama para 'komandan' penerimaan negara sudah disebut. Lulusan Taruna Nusantara (Tarnus) yang pernah menjabat Asisten Deputi Investasi Strategis di Kedepuitan Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, yaitu Bimo Wijayanto ditunjuk sebagai Dirjen Pajak. Sementara, untuk kursi Dirjen Bea Cukai diamanahkan kepada Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budi Utama. Penunjukkan dua pejabat baru tersebut di tengah kabar buruk kondisi 'dompet' pemerintah. Menurut data Kemenkeu, realisasi pendapatan negara tercatat Rp810,5 triliun hingga 30 April 2025. Angka itu merosot 12,4% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan Rp925,2 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Penerimaan perpajakan hanya Rp657 triliun atau merosot 8,7% (yoy). Sementara, kepabeanan dan cukai adalah Rp100 triliun, naik tipis 4,4% (yoy). Pemerintah sendiri menargetkan realisasi pendapatan negara sepanjang 2025 bisa mencapai target Rp 3.005 triliun, sesuai mandat APBN.

Baca Hal 11...

Total kekayaan
**Rp 4.703
miliar**

Total kekayaan
**Rp 6.67
miliar**

OJOL SUARAKAN TUNTUTAN KE PEMERINTAH

Massa driver ojol yang melakukan demonstrasi di kawasan Pintu Utama Monas, Selasa (20/5/2025). Ini terjadi imbas massa aksi tak bisa menembus titik utama lokasi di Kementerian Perhubungan dan Istana Negara. Kemudian, 25 driver ojol diizinkan bertemu perwakilan Kemenhub sekitar pukul 15.40 WIB. Ini terdiri dari 5 orang perwakilan daerah, 5 orang pengemudi taksi online, serta 15 driver ojol. Ada 5 tuntutan yang disuarakan demi kesejahteraan para driver. Tak hanya di Jakarta, di kota-kota besar seluruh Indonesia juga dilakukan aksi serupa.(antara.ist)

Geledah Kemnaker, KPK Jerat

8 Tersangka Korupsi Terkait Tenaga Kerja Asing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Tim penyidik mengusut perkara dugaan korupsi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)



KPK tengah melakukan penyidikan terkait kasus pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Total delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Saat ini sudah ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," kata jubiir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

KPK belum memerinci sosok tersangka dalam kasus ini. Kasus korupsi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja di Kemnaker ini merupakan perkara baru yang diusut KPK. "Secara lengkap kami akan sampaikan," katanya.

Tim penyidik KPK hari ini juga telah menggeledah gedung Kemnaker. Sejumlah tas dibawa oleh penyidik KPK dari pengeledahan di lokasi. "KPK masih akan mendalami informasi dan keterangan dari hasil

pengeledahan hari ini," ucapnya.

KPK sebelumnya mengumumkan telah membuka penyidikan kasus korupsi baru di Kemnaker. Kasus itu berupa suap yang terkait tenaga kerja asing (TKA).

"Suap dan atau gratifikasi terkait TKA," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Pihak Kemnaker juga telah buka suara. Kemnaker mengatakan pihaknya mendukung proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

"Kami sangat mendukung proses hukum yang sedang berjalan," ujar Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga, dalam keterangannya kepada wartawan.

Sunardi menuturkan Kemnaker berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih. Sunardi menjelaskan kasus ini merupakan kasus lama pada 2019.

"Kemnaker berkomitmen untuk

terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," ucapnya.

Sudah Copot Pejabat Terlibat

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut telah mencopot pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diduga terlibat dalam kasus gratifikasi pengurusan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Yassierli bilang, pencopotan ini dilakukan sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki adanya dugaan gratifikasi dalam pengurusan TKA.

"Kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang ini pejabat-pejabat yang diduga terkait dengan kasus ini. Dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK," jelasnya dalam

konferensi pers di Kantor Kemnaker, Selasa (20/5/2025).

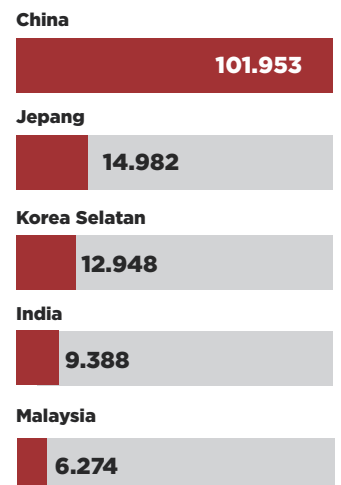
Yassierli tidak menjelaskan detail dari direktorat mana pejabat yang telah dicopot ini. Yang terang, Kemnaker telah mengambil langkah tegas dengan pemecatan secara tidak hormat kepada pejabat yang dimaksud.

Yassierli menyebut, kasus dugaan gratifikasi pengurusan TKA terjadi di tahun 2019. Kemudian mulai dilakukan penyelidikan sejak tahun lalu.

Ia berkomitmen intansi yang dipimpnnya akan patuh terhadap proses hukum yang berlaku di lembaga antirasuah itu.

"Sejak saya jadi Menteri Ketenagakerjaan juga telah melakukan beberapa perbaikan. Mulai dari perbaikan proses bisnis, bagaimana izin terkait dengan tenaga kerja asing ini," ujarnya. (wid,rls,ist,ant/dya)

5 NEGARA ASAL TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA



Sumber : Kemnaker

PHK Berlanjut, Mei Ada 26.455 Kasus

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) catat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia sudah capai 26.455 kasus per Selasa (20/5/2025). Jawa Tengah (Jateng) disebut sebagai provinsi penyumbang angka PHK tertinggi, yaitu sebanyak 10.695 orang.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat total angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terbaru per hari ini yaitu sebanyak 26.455 orang. Dirjen

Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan Jawa Tengah masih menjadi provinsi dengan kasus PHK terbanyak dan industri pengolahan sebagai sektor dengan kasus PHK terbanyak.

"(Kasus PHK) 26.455 (per) 20 Mei tadi pagi, Jawa Tengah tertinggi, nomor dua Jakarta, nomor tiga Riau, sektornya pengolahan, perdagangan besar eceran, dan jasa," kata Indah di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

Indah tidak menampik, kasus PHK sepanjang Januari hingga 20 Mei 2025 ini lebih tinggi dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun dia tidak menjelaskan persentase peningkatan angka PHK tersebut.

Secara rinci, Indah menjelaskan sepanjang Januari hingga 20 Mei 2025, ada sebanyak 10.695 kasus PHK di Jawa Tengah, Jakarta 6.279, Riau 3.570.

Meski demikian Indah mengaku belum mengetahui penyebab Riau masuk dalam tiga provinsi dengan kasus PHK terbanyak pada periode ini. "(Kenapa Riau) yang pertama beberapa industri perdagangan juga ada yang turun ya mungkin ya. Kita belum meneliti sedalam sih kenapa Riau tinggi," katanya.

Hanya saja Indah memastikan data PHK yang dihimpun oleh Kemnaker merupakan laporan dari Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing wilayah. "Tidak ada data yang kami rekayasa Karena kita kan punya sistem

pelaporan dari dinas langsung ke pusat," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Indah juga menanggapi kabar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) soal jumlah PHK yang capai 73.992 sepanjang 1 Januari 2025 sampai 10 Maret 2025.

Indah menuturkan data yang didapat Kemnaker adalah kasus PHK yang inkrah, artinya sudah ada kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja untuk pemangkas karyawan ini. (ist,din,rls/dya)

Pro-Kontra Penulisan Ulang Sejarah Nasional DITOLAK KOALISI MASYARAKAT SIPIL, DIWANTI-WANTI PIMPINAN DPR RI

Kementerian Kebudayaan menjadi sorotan setelah merumuskan penulisan 'sejarah resmi' Indonesia. Penolakan muncul dengan kekhawatiran adanya upaya merekayasa masa lalu bangsa Indonesia melalui pendekatan tafsir tunggal.

Koalisi Masyarakat Sipil dengan tegas menolak proses penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.

Terbaru, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah terbuka soal penulisan ulang sejarah Indonesia. Puan mewanti-wanti agar pemerintah tidak mengaburkan fakta apa pun terkait peristiwa masa lalu.

"Kami juga dari Komisi X akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa. Yang penting jangan ada pengaburan, atau penulisan ulang terkait sejarah tapi kemudian tidak meluruskan sejarah," ujar Puan di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2025).

Lebih lanjut, Puan mengingatkan kembali semboyan Jas Merah yang pernah digaungkan oleh Presiden pertama RI, Soekarno. Dengan demikian, menurut Puan, setiap peristiwa baik maupun buruk harus benar-benar tercatat dalam sejarah dan tak boleh dikaburkan.

"Jadi jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Memang sejarah itu pasti ada yang baik, ada yang pahit. Namun, bagaimana kemudian ke depan itu kita harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh pahlawan-pahlawan kita," kata Puan.

"Apa pun yang terjadi ya harus tahu kenapa Indonesia berdiri pahit dan getirnya berhasil baiknya itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi," ujarnya lagi.

Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) mengatakan, "Kami AKSI dengan ini menyatakan menolak proyek penulisan sejarah resmi Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia,"



Ketua DPR Puan Maharani

ujar Ketua AKSI, Marzuki Darusman dalam rapat dengar pendapat umum dengan DOR Senin (19/5/2025).

Dia mengatakan, proyek penulisan sejarah resmi tersebut adalah upaya merekayasa masa lalu bangsa Indonesia dengan pendekatan tafsir tunggal. "Tindakan itu merupakan cara halus pemerintah untuk mengontrol pemikiran rakyat dan memonopoli kebenaran atas sejarah bangsa," katanya.

Anggota AKSI Andi Achdian

mengatakan, proyek tersebut berisiko mencederai prinsip keterbukaan dan demokrasi dalam penulisan sejarah bangsa. "Penjamahan sejarah sekecil apa pun oleh kekuasaan, apalagi penulisan sejarah tunggal Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan, perlu dihentikan dan ditolak," tegas Andi.

Menurut Andi, sejarah Indonesia tidak seharusnya menjadi instrumen untuk memuliakan kekuasaan dengan cara direkayasa melalui

penulisan ulang pemerintah. Dia pun mengingatkan bahwa pengalaman pahit bangsa Indonesia yang dicatat dalam sejarah justru, telah menjadi pelajaran penting bagi dunia dan tidak boleh diselewengkan.

"Pengalaman kesejarahan bangsa Indonesia telah menjadi rujukan sejarah dunia, bagaimana pengalaman pahit bangsa Indonesia sebagai instrumen sejarah yang bertujuan memuliakan kekuasaan, menunjukkan bahwa penggelapan sejarah akan membawa petaka bagi bangsa Indonesia," ujar Andi.

Oleh karena itu, mereka meminta proyek penulisan ulang sejarah nasional yang dijalankan melalui Kementerian Kebudayaan itu dihentikan.

Sekretaris Ketua Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia Ita Fatia Nadia, mengatakan pertemuan dengan Komisi X—awalnya muncul dari keprihatinan yang sangat dalam tentang proses perumusan sejarah Indonesia. (din,ist,rls/dya)

Rencana 10 Bab Sejarah Nasional

PEMERINTAH sedang menulis ulang sejarah nasional Indonesia versi terbaru. Ini rancangan 10 bab sejarahnya. "Judul 10 jilid belum fixed, karena masih lentur dalam mewadahi substansi," kata Ketua Tim Penulisan Ulang Sejarah RI, Profesor Susanto Zuhdi.

Meski judul bab-bab dalam 'buku besar' sejarah nasional itu belum pasti, namun tema bab-bab itu sudah pasti mewakili tiap-tiap babak perjalanan masalalu Indonesia.

Dia menjelaskan topik bab-bab tersebut diawali dengan peradaban awal (prasejarah), dilanjutkan dengan topik interaksi dengan India (Hindu-Buddha), interaksi dengan Persia/Arab/Timur Tengah (Islam), kerajaan-kerajaan Nusantara, hingga kedatangan orang Eropa/VOC.

Bab selanjutnya akan berisi sejarah kolonial Hindia-Belanda, pergerakan nasional, dan penjajahan Jepang. Bab sejarah kemerdekaan menyusul setelahnya, dilanjut dengan bab era 1950-an yang diwarnai gejolak daerah/ disintergrasi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, berganti dengan bab tentang Orde Baru,

hingga bab era reformasi dan masa kini (kontemporer).

"Tampak merupakan tonggak-tonggak sejarah bangsa, up and down," ujar Susanto.

Senada dengan penjelasan Susanto, salah satu editor umum penulisan ulang sejarah RI, Profesor Singgih Tri Sulistiyono menjelaskan rancangan 10 bab sejarah nasional Indonesia itu.

Bab I: Sejarah awal. Tim penulisan ulang sejarah RI sengaja menghindari istilah "prasejarah" lantaran mereka menilai istilah itu terkesan rendah diri. Meskipun, bab ini dikenal sebagai bab era "prasejarah" dalam penulisan yang lazim dikenal saat ini, yakni era sebelum mengenal tulisan.

"Kita ganti istilah 'prasejarah' karena itu mengandung konotasi inferior, seolah-olah yang belum mengenal tulisan lebih rendah ketimbang yang sudah mengenal tulisan. Padahal, mereka mampu mengarungi samudera dari Formosa ke Nusantara dan Pasifik," ujar Singgih.

Bab II: Perjumpaan budaya dengan India yang menggambarkan

historiografi era Hindu-Buddha sudah mengakui adanya perspektif otonomis sejarah.

Bab III: Perjumpaan budaya dengan Timur Tengah. Pada periode ini, masyarakat memperkaya lagi budayanya dengan budaya Timur Tengah meski masyarakat tidak sama persis menerapkan budaya Timur Tengah ke Indonesia.

Bab IV: Perjumpaan dengan kongsi dagang asing Eropa, yang menceritakan perihwal perjumpaan dengan VOC Belanda, EIC Inggris, bangsa Spanyol, dan Portugis.

Bab V: Kolonialisme dan perlawanannya dilanjutkan Bab VI: Munculnya nasionalisme Indonesia dan Bab VII: Perang kemerdekaan Belanda dan Sekutu. Bab ini akan menceritakan sejarah selepas proklamasi kemerdekaan hingga tahun 1949.

Bab VIII: Demokrasi liberal dengan menceritakan sejarah dari tahun 1950-an. Saat itu, terjadi sejumlah pemberontakan di dalam negeri.

Bab IX: Orde Baru dan Bab X: Reformasi 1998 sampai pemerintahan Presiden Jokowi. (din,kcm,rls/dya)

Polemik Dugaan Ijazah Palsu

MAP HITAM DAN TAWA JOKOWI USAI DIPERIKSA SEJAM

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), rampung dimintai klarifikasi di Bareskrim Polri pada Selasa (20/5/2024). Ia dimintai keterangan selama sekitar 1 jam terkait laporan dugaan ijazah palsu.

Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) diperiksa Bareskrim Polri selama sekitar 1 jam terkait dugaan ijazah palsu yang diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pimpinan Eggi Sudjana. Selain diperiksa, Jokowi mengaku kedatangannya ke Bareskrim untuk mengambil ijazahnya yang pernah diserahkan ke Bareskrim terkait penyelidikan kasus tersebut.

"Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil," kata Jokowi sambil mengangkat map warna gelap di hadapan wartawan usai diperiksa polisi.

Wartawan kemudian meminta agar Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang sudah dia ambil itu. "Boleh ditunjukkan Pak, ijazahnya, kan sudah dibawa," pinta jurnalis.

Sambil menyunggungkan tawa khasnya, Jokowi mengaku bakal menunjukkan ijazah aslinya apabila diminta oleh pengadilan. "Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim," kata dia.

Jokowi menunggu perintah pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Sebab menurutnya itulah tempat yang tepat.

"Ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang, lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti," dalihnya.

Adapun ijazah Jokowi pernah diserahkan ke Bareskrim pada 9 Mei oleh adik ipar Jokowi. Pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan, menyabut ijazah yang diserahkan adalah ijazah SMA dan kuliah.

Jokowi muncul di lobi gedung dengan membawa sebuah map hitam

berlogo Universitas Gadjah Mada (UGM). Map tersebut tampak usang, dengan tulisan yang sebagian telah memudar.

"(Selain diperiksa) sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan kepada Bareskrim dan sudah saya ambil," ujar Jokowi.

"Universitas Gadjah Mada" dan nama "Ir Joko Widodo" tampak tercetak di map, meski warnanya memudar.

Dia menyebut ijazah asli milik Presiden sempat ditunjukkan kepada penyidik dalam pemeriksaan sebelumnya.

Ia menyatakan bahwa proses klarifikasi juga mencakup pemeriksaan laboratorium forensik (labfor). "Sempat, sempat (dibuka). Pertanyaan-pertanyaannya juga seputaran ijazah tersebut," ucap Yakup.

Polri Segera Gelar Perkara

BARESKRIM Polri segera melaksanakan gelar perkara terkait dengan laporan dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). "Tindak lanjut berikutnya penyidik akan melakukan gelar perkara pada minggu ini," ujar Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Truno mengatakan, saat ini proses penyelidikan masih dilakukan dan penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. "Proses penyelidikan secara simultan dan berkesinambungan masih berlangsung. Tahapan tentu dilakukan secara prosedural dan profesional kemudian juga menunggu hasil dari laboratorium forensik," imbuhnya.

Truno memastikan, hasil dari penyelidikan ini akan disampaikan secara terbuka dan transparan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim



Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) diperiksa Bareskrim Polri selama sekitar 1 jam terkait dugaan ijazah palsu.ist

"Ijazah tersebut sudah disampaikan dari minggu lalu ya. Jadi, ya tentunya dari pihak penyidik juga sudah melakukan Puslabfor dan semua yang diperlukanlah. Jadi kita juga masih menunggu hasilnya," sambungnya.

Kasus ijazah Jokowi pernah masuk pengadilan dengan terdakwa Bambang Tri dan Sugi Nur, keduanya divonis 6 tahun penjara oleh PN Solo karena dinilai menyebarkan berita bohong tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Dalam sidang, tidak ada perintah hakim untuk menunjukkan ijazah asli Jokowi. Sebelumnya, Bambang Tri juga divonis 3 tahun oleh PN Blora terkait bukunya yang berjudul "Jokowi Undercover 1".

Adapun saat dimintai klarifikasi oleh penyidik hari ini, Jokowi mengaku menjawab sebanyak 22 pertanyaan

menyangkut ijazahnya. Selain itu, penyidik juga menanyakan soal skripsinya.

"Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah, dari SD, SMP, SMA, sampai universitas. Juga yang berkaitan dengan skripsi dengan kegiatan saat mahasiswa, saya kira di sekitar itu," ucap dia.

Deretan Laporan dan Gugatan soal Ijazah Jokowi

○ Gugatan Dugaan Ijazah Palsu Jokowi di PN Solo

Perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt diajukan pengacara Muhammad Taufiq. Tergugat: Jokowi, KPU Solo, SMAN 6 Solo, dan UGM. Mediasi ketiga pada 14 Mei 2025 kembali gagal.

○ Jokowi Laporkan Dugaan Fitnah

Pada 30 April 2025, Jokowi lapor lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu. Terlapor: Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, serta dua inisial ES dan K. Laporan gunakan UU ITE.

○ Peradi Bersatu Juga Melapor

Peradi Bersatu melaporkan Roy Suryo dan empat orang lain (RS, T, ES, K) ke Polres Metro Jaksel. Dituding melanggar UU ITE Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 160 KUHP karena diduga menyebar hoaks dan provokasi soal ijazah Jokowi. Laporan oleh Lechumanan.

○ UGM Digugat Rp 1.069 Triliun

Di PN Sleman (Perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn), delapan pejabat UGM digugat atas dugaan perbuatan melawan hukum. Tuntutan: kerugian materiil Rp 69 triliun dan immateriil Rp 1.000 triliun.

○ Kader PSI Dipolisikan

Dian Sandi Utama (PSI) dilaporkan ke Bareskrim oleh dosen USU berinisial YLH karena unggah foto ijazah Jokowi tanpa izin. Dikenakan Pasal 32 UU ITE.

adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, Eggy Sudjana, dan Kurnia Tri Royani. (wid,rls,ant/dya)

TEGURAN KERAS ARAB SAUDI KE KEMENAG RI GEGARA JEMAAH HAJI ILEGAL

Pemerintah Arab Saudi telah menyampaikan teguran tegas kepada Indonesia terkait maraknya praktik haji ilegal yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI). Mereka tertangkap menggunakan visa non-haji, seperti visa ziarah atau visa kerja musiman.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi meminta Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan visa selain visa haji resmi. Praktik haji ilegal ini menjadi perhatian serius karena berpotensi merugikan jamaah haji resmi dan mencoreng citra Indonesia di mata internasional.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi sangat serius dalam mencegah masuknya jamaah haji ilegal.

"Saya diperingatkan langsung oleh Kemenhaj (Saudi) dalam rapat. Saya agak malu juga lah, sampai berkali-kali. (Peringatannya) agak keras juga. Dampaknya bagi calon jamaah haji yang beneran (menunaikan haji dengan visa haji). Mereka punya visa haji, tapi karena nusuk yang belum terbit, bisa menjadi ketat sekali. Karena informasinya sampai ke sana (Saudi)," kata Hilman, yang dikutip Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, modus operasi haji ilegal semakin beragam dan kompleks. Beberapa agen perjalanan haji ilegal banyak menawarkan paket haji instan atau haji tanpa antrre dengan harga yang sangat tinggi.

Untuk menghindari deteksi, mereka biasanya terbang ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, atau Korea Selatan, sebelum akhirnya menuju ke Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemeriksaan ketat di bandara yang memiliki penerbangan langsung ke Jeddah. Setelah tiba di Arab Saudi, mereka berusaha berbaur dengan jamaah haji resmi.

Pemerintah Arab Saudi member-

lakukan sanksi berat bagi pelanggar, termasuk denda hingga 100.000 riyal Saudi (sekitar Rp448 juta), deportasi, dan larangan masuk kembali ke Arab Saudi.

Sanksi ini juga berlaku bagi pihak yang memfasilitasi pelanggaran, seperti menyediakan akomodasi atau transportasi bagi jamaah haji ilegal. Kemenag RI mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran haji tanpa antrean yang menggunakan visa non-haji.

Selain melanggar hukum, praktik ini juga berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kenyamanan jamaah. Masyarakat diingatkan untuk selalu mengikuti prosedur resmi dan menggunakan visa haji yang sah dalam melaksanakan ibadah haji.

Benahi Tata Kelola Dam dan Kurban

Royal Commission for Makkah City and Holy Sites (RCMCHS), yang langsung dipimpin Putra Mahkota Arab Saudi, Pengeran Muhammad Bin Salman, sangat serius membenahi tata kelola dam dan kurban selama musim Haji 2025. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menunjuk Adahi sebagai satu-satunya lembaga resmi pemerintah yang akan mengelola dam



Petugas menyambut seorang calon haji Indonesia kloter JKG 01 dari Madinah yang berkursi roda sesampainya di Hotel Al Ghader, Syisyah, Makkah, Arab Saudi, Sabtu (10/5/2025). (antara)

dan kurban para jamaah.

Hal ini disampaikan Chief Program Management Officer, Saad Abdulrahman Alwabel, dalam temuannya dengan Konsulat Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Yusron B Ambary dan Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis M Hanafi di kantor RCMCHS di Makkah, Senin (19/5/2025). Menurut dia, penunjukan itu untuk memberikan jaminan syariah kepada jamaah yang harus membayar dam atau melakukan kurban.

"Tata kelola mencakup pengadaan hewan, pembayaran, penyembelihan, dan distribusi kepada para mustahik. Semua proses ini dapat dipantau melalui link yang akan diberikan kepada jamaah yang membeli dam atau kurban," kata Yusron melalui keterangan tertulis, Selasa (20/5/2025).

Dia menjelaskan proses penyembelihan hewan kurban juga dapat disaksikan langsung melalui link dimaksud. Pembelian dam dan kurban dapat dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk, Kantor Pos, dan konter-konter khusus di sekitar Makkah.

Dalam maklumat haji yang diterbitkan, KAS telah mengeluarkan edaran resmi bahwa pembayaran dam atau kurban di luar Adahi adalah ilegal dan dapat dikenakan hukuman. KAS

juga akan serius memberantas praktik-praktik pengelolaan dam dan kurban di luar Adahi.

Pengawasan ketat akan dilakukan antara lain melalui drone untuk memantau tempat-tempat yang biasanya dijadikan lokasi penyembelihan ilegal. Selain itu pengawasan transaksi keuangan dan komunikasi juga akan diperketat untuk memastikan transaksi ilegal tidak terjadi.

KJRI Jeddah kembali mengimbau para WNI yang tinggal di Arab Saudi untuk menghindari berbagai promosi dan praktik jual beli dam. Sebab, akan diawasi secara ketat Aparat Keamanan KAS dan bagi pelakunya akan dikenakan hukuman berat, berupa penjara dan penyitaan barang bukti uang yang digunakan untuk transaksi. (wid,ist,rls/dya)

Raja Salman Undang 1.000 Warga Palestina Beribadah Haji

RAJA Salman dari Arab Saudi mengundang 1.000 orang warga Palestina keluarga korban serangan Israel untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Dilansir dari Saudi Gazette, program ini merupakan bagian dari rutin Kerajaan Arab Saudi.

Menteri Urusan Islam, Panggilan dan Bimbingan dan Pengawas Umum program Sheikh Abdullatif Al-Sheikh menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Raja dan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman atas undangan tersebut. Dia mengatakan undangan itu itu mencerminkan perhatian Ara Saudi untuk mendukung warga Palestina.

Al-Sheikh menekankan inisiatif

ini merupakan perluasan dari upaya kepemimpinan untuk memfasilitasi pelaksanaan ritual haji bagi orang-orang Palestina. Ia mengatakan semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi selama mereka tinggal di Makkah dan Madinah.

Tahun lalu, Raja Salman mengundang 1.000 peziarah dari 66 negara untuk melakukan umrah. Ini adalah bagian dari Program Penjaga Dua Masjid Suci untuk Haji, Umrah, dan Kunjungan. Para peziarah ditampung dalam empat kelompok selama yang berakhir pada Juni 2025.

Menjelang puncak ibadah haji pada pekan pertama Juni 2025,

Total Jamaah yang telah tiba

504.664
Jamaah

**Kedatangan
Berdasarkan Transportasi**

Data: 19 Mei 2025

Darat

10.117 Jamaah

Udara

493.125 Jamaah

Laut

1.442 Jamaah

**Presentase Jamaah Haji
yang telah tiba 36 % dari total
visa diterbitkan**

jamaah haji dihimbau agar mengurangi aktifitas fisik seperti ziarah ke luar kota. Kementerian Agama mengimbau para jamaah mengikuti manasik haji di hotel pemondokan untuk mempersiapkan fisik. (wid,rls,ant/dya)

Pendapatan Pajak Hotel di Kota Malang Melorot 4 Bulan Berturut-turut



(Ilustrasi) Salah satu Hotel di Kota Malang. (Santi/Lentera)

MALANG - Pendapatan pajak hotel di Kota Malang terus melorot selama empat bulan berturut-turut sejak awal 2025. Di sisi lain, sektor pajak makanan dan minuman, reklame, parkir, dan air bawah tanah justru melonjak, melampaui target triwulan kedua.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi

Priyanto, mengatakan pada Januari 2025, pendapatan pajak hotel tercatat sebesar Rp7 miliar. Angka ini menurun pada bulan Februari menjadi Rp4 koma sekian miliar, lalu Rp3,7 miliar di bulan Maret, dan kembali turun ke angka Rp3,1 miliar pada April.

"Pendapatan pajak hotel di bulan Mei kami belum hitung.

Tetapi memang mulai Januari-April kemarin turun," ujar Handi, Selasa (20/5/2025).

Menurut Handi, salah satu penyebab utama penurunan ini adalah penerapan efisiensi kebijakan oleh pemerintah pusat melalui Inpres 1/2025. Dikatakannya, banyak Kementerian/Lembaga, dan perusahaan BUMN, yang melakukan

pembatalan kegiatan setelah sebelumnya sudah memesan tempat di hotel-hotel Kota Malang.

"Iya, salah satunya memang dari itu (kebijakan efisiensi)," tambahnya.

Kondisi lesunya pendapatan hotel ini disebut terjadi merata di seluruh hotel, tak hanya yang memiliki fasilitas hall atau convention. Menurutnya, hari kerja menjadi periode paling sepi, sedangkan akhir pekan masih menunjukkan okupansi yang cukup stabil.

Meski mengalami penurunan, Bapenda Kota Malang tetap menargetkan pendapatan dari sektor pajak hotel tahun ini sebesar Rp56 miliar. Dimana hingga 19 Mei 2025, realisasi pendapatan baru mencapai Rp19,8 miliar. "Kalau target khusus triwulan kedua ini mencapai Rp22,4 miliar," kata Handi.

Meskipun tren selama empat bulan awal tahun menunjukkan penurunan, Handi menyampaikan, secara total pendapatan pajak hotel tahun ini masih sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga berharap, dengan mulai dibukanya blokir anggaran di Kementerian/Lembaga, kondisi ini

dapat segera membaik.

Di sisi lain, Handi menyebutkan ada empat sektor pajak yang justru telah melampaui target triwulan kedua tahun 2025, berbanding terbalik dengan sektor hotel.

Berdasarkan data per 19 Mei 2025, pajak makanan dan atau minuman, menurutnya berhasil mencapai Rp70,9 miliar dari target Rp65,3 miliar. "Disusul reklame yang dari target Rp12 miliar sudah tercapai Rp15,7 miliar," jelas Handi.

Sektor pajak parkir juga mencatat pencapaian sebesar Rp2,9 miliar dari target Rp1,8 miliar. Sementara itu, pajak air bawah tanah menyentuh angka Rp1,4 miliar dari target Rp1,05 miliar. Dengan waktu satu bulan tersisa sebelum berakhirnya triwulan kedua, Handi mengaku optimistis realisasi pendapatan dari sektor-sektor pajak lain di Kota Malang masih bisa ditingkatkan.

Event-event besar seperti Pekan Olahraga Provinsi (Poprov) Jatim 2025, kegiatan pariwisata, serta festival lainnya, diharapkan mampu menjadi penopang perputaran ekonomi lokal, khususnya pada sektor perhotelan yang masih lesu. (Santi/dya)

DPRD Kabupaten Malang Usulkan Fatwa Haram Bisnis Rokok Ilegal

MALANG - DPRD Kabupaten Malang mengusulkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan, untuk menerbitkan fatwa haram terhadap bisnis rokok ilegal. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat penegakan hukum, baik dari sisi regulasi negara maupun legitimasi keagamaan.

"Kami mengusulkan, tentunya melalui Pemkab agar bisa melobby. Harus ada pendekatan ke tokoh-tokoh agama. Entah itu melalui ormasnya, Muhammadiyah, NU, atau MUI, agar kemudian mengeluarkan fatwa haram bisnis rokok ilegal. Bukan transaksi rokok ilegal," ujar Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham A. Mubarak, Selasa (20/5/2025).

Zulham mencontohkan, fatwa serupa telah sempat dirilis oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep beberapa tahun lalu. Lembaga Bahtsul Masa'il dari organisasi tersebut, menurutnya secara resmi menyatakan bisnis rokok ilegal haram dari perspektif syariah.

"Kalau ini juga diberlakukan di Kabupaten Malang, maka akan memperkuat upaya penegakan hukum. Hukum negara jalan, hukum agama juga punya dasar. Jadi ada 'double garden'," tegasnya.

Menurutnya, potensi peningkatan penerimaan daerah dari sektor cukai sangat besar jika peredaran rokok ilegal dapat ditekan secara signifikan. Ia menyebut, tanpa penindakan yang maksimal saja, saat ini Kabupaten Malang masih mampu mencatat perolehan cukai hingga Rp158 miliar.

"Bayangkan kalau pengusaha rokok ilegal ini beralih menjadi legal semua, saya yakin Rp200 miliar itu sangat mungkin dicapai. Ini penting karena PAD kita kan hanya Rp1,1 triliun," katanya.

Lebih lanjut, Zulham menilai pemberantasan rokok ilegal bukan semata persoalan hukum, melainkan juga soal perubahan perilaku dan kesadaran sosial. Ia menyoroti, masih adanya pelaku usaha yang memproduksi rokok dalam dua jalur distribusi, yakni legal dan ilegal sekaligus.

"Minimal dengan adanya fatwa itu, pengusahanya bisa berubah sikap. Ini bukan semata soal bisnis, tapi juga soal etika dan tanggung jawab sosial," ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya daya dukung dari institusi sosial dan agama dalam memerangi praktik ilegal tersebut. Menurutnya, sebagian pelaku bisnis rokok ilegal justru

berlindung di balik simbol-simbol keagamaan.

"Fakta di lapangan, perputaran rokok ilegal seringkali juga terkait dengan sektor-sektor sosial yang dekat dengan masyarakat, termasuk institusi keagamaan. Maka jika ini disentuh, akan sangat efektif," terang Zulham.

Zulham yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi di MUI Kabupaten Malang mengakui, dorongan tersebut merupakan tantangan bagi dirinya dan rekan-rekan di MUI. Ia berkomitmen akan membawa wacana ini ke internal organisasi untuk dibahas lebih lanjut.

"Ini pukulan juga bagi kami di MUI. Tapi saya akan usulkan ini menjadi pembahasan, baik di dewan maupun di internal MUI. Kita akan lihat bagaimana dinamika ke depannya, apakah akan dikeluarkan MUI atau NU," ungkapnya.

Ia menegaskan, jika fatwa tersebut benar-benar dikeluarkan oleh ormas



Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Mubarak. (Santi/Lentera)

keagamaan di Kabupaten Malang, maka akan ada perubahan besar dalam penanganan rokok ilegal. Selain mempersempit ruang gerak pengusaha nakal, pendekatan keagamaan juga dinilai akan lebih menyentuh hati masyarakat.

"Kalau ini bisa keluar, akan jadi gerakan yang luar biasa. Kabupaten Malang bisa jadi contoh daerah yang tidak hanya tegas secara hukum, tapi juga bermartabat secara sosial dan spiritual," pungkas Zulham. (Santi/dya)



Tentara India memantau situasi di Kashmir. (Getty Images)

Pemerintah India menangkap sebelas warganya yang diduga terlibat dalam aktivitas mata-mata untuk Pakistan.

Penangkapan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir tersebut, yang disebut-sebut sebagai salah satu konflik paling serius dalam beberapa dekade terakhir.

Sedikitnya 60 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan yang terjadi awal bulan ini, menyusul serangan terhadap wisatawan pada 22 April di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Pihak India menuding Pakistan berada di balik serangan tersebut, namun tuduhan itu telah dibantah oleh pemerintah Pakistan.

Wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya beragama Islam diklaim sepenuhnya oleh baik India maupun Pakistan. Kedua negara telah terlibat dalam beberapa konflik bersenjata di kawasan Himalaya itu sejak mereka merdeka dari Inggris pada tahun 1947.

Dikutip dari AFP, Selasa (20/5/2025), media lokal NDTV melaporkan pada hari Senin (19/5/2025) waktu setempat, bahwa pihak berwenang telah menangkap sembilan orang yang diduga "mata-mata" di negara-negara bagian Haryana, Punjab, dan Uttar Pradesh.

Sementara itu, Direktur Jenderal Polisi Punjab, Gaurav Yadav, mengatakan pada hari Senin bahwa timnya telah menangkap dua orang yang "terlibat dalam membocorkan informasi militer yang sensitif".

Polisi telah menerima "masuk intelijen yang kredibel" bahwa kedua pria itu terlibat "dalam berbagi rincian rahasia" terkait dengan serangan New Delhi ke wilayah Pakistan pada malam 6-7 Mei.

Penyelidikan awal menunjukkan bahwa mereka "berhubungan

langsung" dengan para agen dari badan intelijen Pakistan, Inter-services Intelligence (ISI), dan "telah mengirimkan informasi penting mengenai Angkatan Bersenjata India," tambah Yadav.

Di Haryana, polisi menangkap seorang blogger minggu lalu atas tuduhan serupa.

Polisi mengatakan bahwa wanita itu telah melakukan perjalanan ke Pakistan setidaknya dua kali, dan telah berhubungan dengan seorang pejabat dari kedutaan negara itu, demikian dilaporkan media lokal.

INDIA TANGKAP 11 ORANG DIDUGA MATA-MATA PAKISTAN

Orang-orang lainnya yang ditangkap termasuk seorang mahasiswa, seorang penjaga keamanan, dan seorang pengusaha.

Kantor berita India Today melaporkan 11 penangkapan tersebut. Dikatakan bahwa para tersangka "dibujuk masuk ke jaringan mata-mata melalui media sosial, insentif uang, janji-janji palsu, aplikasi pengiriman pesan, dan kunjungan pribadi ke Pakistan".

Penangkapan itu terjadi setelah gejolak kekerasan terburuk antara kedua negara itu sejak konflik terakhir mereka pada tahun 1999.

Gencatan senjata kemudian disepakati setelah empat hari serangan rudal, drone dan artileri yang memicu kekhawatiran akan terjadinya perang besar-besaran. (AFP, CNA, NDTV, ist/nei)

Jet Tempur J-10 Dianggap Sukses Guncang Gengsi Militer

MENTERI Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menyebut bahwa China merasa puas setelah militer Islamabad berhasil menunjukkan keunggulan atas angkatan udara rivalnya dengan menggunakan jet tempur buatan China, Chengdu J-10.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dar di hadapan parlemen pekan lalu, dikutip dari France24.

Di hadapan para anggota parlemen, Dar menyampaikan bahwa pihaknya langsung menginformasikan kepada para diplomat Tiongkok yang berkunjung ke Kementerian Luar Negeri bahwa jet tempur J-10 buatan China berhasil digunakan untuk menjatuhkan pesawat-pesawat musuh.

Ia bercerita bahwa para delegasi China tersebut buru-buru mendatangi Kantor Kemlu Pakistan di Islamabad pada Rabu (7/5/2025) subuh pukul 04.00. Kunjungan para diplomat China itu dilakukan sejam setelah India melancarkan operasi militer Sindoor ke wilayah Pakistan.

India menyerang wilayah

Pakistan dengan kode serangan Operasi Sindoor sebagai dalih atas balasan insiden penembakan di Pahalgam, Kashmir, yang menewaskan 26 turis, mayoritas warga India.

New Delhi menuduh Pakistan berada di balik serangan milisi The Resistance Front (TRF) terhadap para warganya, Islamabad segera membantah tuduhan itu.

Meski demikian, Pakistan langsung siaga penuh mengantisipasi serangan dari India saat itu. Sistem pertahanan termasuk jet-jet tempur buatan China pun turut disiagakan.

"Jet tempur kita menembak jatuh tiga pesawat Rafale India buatan Prancis. Kita menggunakan J-10," kata Dar kepada Majelis Nasional, merujuk jenis jet Chengdu J-10 Vigorous Dragon buatan China, dikutip dari France24, Selasa (20/5/2025).

Hal itu disebut jadi tes pertama jet-jet buatan dalam pertempuran sesungguhnya saat terjadi

Update Konflik India-Pakistan

- **Serangan di Kashmir**
Serangan terhadap wisatawan di Kashmir pada 22 April 2025 picu bentrokan, menewaskan setidaknya 60 orang.
- **Tuduhan Saling Lempar**
India tuduh Pakistan dukung militan, Pakistan bantah tuduhan tersebut.
- **Penangkapan Diduga Mata-mata**
India tangkap 11 orang yang diduga agen intelijen Pakistan, picu kekhawatiran eskalasi.
- **Unjuk Kekuatan Jet Tempur**
Pakistan pameran jet Chengdu J-10 buatan China dalam latihan militer. China diklaim puas atas performa J-10.
- **Klaim di Forum Diplomatik**
Menlu Pakistan lapor ke parlemen bahwa sukses J-10 langsung dilaporkan ke diplomat China.
- **Perlombaan Senjata Berlanjut**
India gandeng Rusia & AS, Pakistan kerja sama dengan China & Turki untuk modernisasi militer.
- **Seruan Internasional**
PBB dan komunitas global minta kedua negara menahan diri, mengingat keduanya punya senjata nuklir.
- **Retorika Politik Memanas**
Pejabat dari kedua negara saling lontarkan pernyataan keras, memperkeruh hubungan diplomatik.
- **Kashmir Tetap Titik Panas**
Kedua negara masih klaim penuh atas wilayah Kashmir sejak konflik 1947.
- **Ancaman Spionase & Cyberwar**
India dan Pakistan saling tuduh lakukan spionase dan serangan siber lintas batas.



konfrontasi militer antara Pakistan dan India.

Dar kemudian melanjutkan ceritanya bahwa para delegasi dari China itu sangat gembira dengan performa J-10 dalam pertempuran udara tersebut.

"Sebagai negara bersahabat, mereka (para diplomat China)

Kembali Mewabah, Ini Varian Covid-19 yang Muncul

Kasus Covid-19 kembali muncul. Kali ini, lonjakan infeksi terjadi di sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Tak hanya itu, Hong Kong pun sebelumnya telah melaporkan peningkatan signifikan dalam jumlah pasien yang terinfeksi virus ini.

Pada 13 Mei 2025, otoritas kesehatan Singapura mengumumkan peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan. Dalam periode 27 April hingga 3 Mei, tercatat sebanyak 14.200 kasus baru, naik dari 11.000 kasus pada minggu sebelumnya.

Mengutip situs Channel News Asia, mayoritas kasus Covid-19 yang terjadi adalah varian LF.7 dan NB. 1.8 yang merupakan turunan dari JN.1. Varian JN.1 merupakan varian virus yang dipakai untuk vaksin Covid-19.

Virus SARS-Cov-2 memang aktif bermutasi. Mutasi terjadi sebagai respons terhadap perubahan lingkungan, termasuk kekebalan tubuh manusia. Setiap mutasi menghasilkan varian baru yang terus dipantau oleh para ahli guna mengantisipasi risiko penularan dan tingkat keparahannya.

Berikut ini adalah deretan varian Covid-19 beserta ciri khas dan gejalanya:

Alpha

Varian Alpha pertama kali terdeteksi di Inggris pada bulan September 2020. Di Indonesia, varian ini mulai ditemukan pada Mei 2021. Dibandingkan dengan varian sebelumnya, Alpha memiliki tingkat penularan yang 43 hingga 90 persen lebih cepat. Gejala umum yang dialami penderita mencakup batuk, demam, kehilangan penciuman (anosmia), sesak napas, pusing, mual, kelelahan, dan kesulitan berkonsentrasi.

Beta

Beta berasal dari Afrika Selatan dan terdeteksi pertama kali pada Mei 2020. Di Indonesia, varian ini ditemukan di Bali pada Mei 2021. Gejala yang umum dilaporkan adalah demam, anosmia, batuk yang terus-menerus, sakit kepala, serta sakit tenggorokan.

Delta

Delta pertama kali muncul di India pada Oktober 2020 dan mulai menyebar di Indonesia melalui Kudus dan Jakarta. Varian ini memiliki tingkat penularan yang 30 hingga 100 persen lebih tinggi dari varian sebelumnya. Gejala yang menyertainya antara lain demam, sakit kepala, hilang nafsu makan, dan flu berat.

Gamma

Varian Gamma terdeteksi di Brasil pada bulan November 2020. Gejala yang ditimbulkan meliputi demam, batuk kering, kelelahan ekstrem, dan kehilangan indera penciuman (anosmia).

Omicron

Omicron ditemukan di Afrika Selatan pada November 2021 dan masuk ke Indonesia melalui Jakarta pada Desember 2021. Varian ini dikenal sangat menular, dengan kemampuan penularan hingga 500 persen lebih tinggi dibanding Delta. Gejalanya cenderung ringan dan umumnya tidak menyebabkan sesak napas.

Omicron XE

Merupakan gabungan dari dua subvarian Omicron, yaitu BA.1 dan BA.2. Omicron XE terdeteksi pertama kali di Inggris pada Januari 2022. Varian ini memiliki tingkat penularan yang sekitar 10 persen lebih tinggi dari BA.2. Gejala yang muncul antara lain sakit kepala, demam, nyeri otot, dan sakit tenggorokan.

Lambda

Lambda berasal dari Peru dan pertama kali ditemukan pada Desember 2020. Gejala yang ditimbulkan meliputi batuk, demam, dan kehilangan penciuman (anosmia).

Kappa

Kappa juga berasal dari India dan teridentifikasi pada Oktober 2021. Gejala yang dialami penderita mencakup flu, demam, batuk, ruam pada kulit, serta mata merah.

Lota

Varian Lota ditemukan pertama kali di New York, Amerika Serikat, pada November 2020. Gejala yang ditimbulkan tidak terlalu spesifik dan cenderung mirip dengan gejala pada varian-varian lain.

Epsilon

Epsilon terdeteksi di California, Amerika Serikat, pada Juli 2020. Gejala yang muncul meliputi demam, batuk, sesak napas, anosmia, dan nyeri otot.

Kraken

Kraken merupakan subvarian Omicron yang mendominasi secara global sejak Januari 2023. Subvarian ini dikenal sebagai yang paling menular di antara subvarian Omicron lainnya yang ada saat ini.

Arcturus

Arcturus pertama kali terdeteksi pada Januari 2023. Tingkat

penularannya diperkirakan 1,17 hingga 1,27 kali lebih tinggi dibanding Kraken. Gejala khasnya adalah demam tinggi (terutama pada anak-anak), konjungtivitis atau mata merah dan gatal, batuk, tenggorokan gatal, pilek, hidung tersumbat, kelelahan, dan nyeri otot.

JN.1 (subvarian Omicron)

JN.1 adalah subvarian Omicron yang mulai terdeteksi pada akhir 2023 dan merupakan turunan dari BA.2.86 (Pirola). Varian ini memiliki tingkat penularan sangat tinggi dan sempat menjadi dominan di awal 2024.

Di Indonesia, kasus JN.1 terdeteksi pada akhir 2023. Gejalanya umumnya ringan hingga sedang, seperti batuk, demam, sakit tenggorokan, pilek, kelelahan, dan kadang gangguan penciuman. (nei,ist/dya)

Varian Covid-19

Variant of Concern (VoC)

Varian yang memiliki tingkat penularan tinggi dan dampak signifikan, seperti Alpha, Beta, Delta, Gamma, dan Omicron.

Variant of Interest (VoI)

Varian yang memiliki potensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat, misalnya Lambda dan Mu.

Variant under Monitoring (VuM)

Varian yang masih dipantau karena belum diketahui secara pasti dampaknya, seperti Kappa, Lota, dan Epsilon.

Peneliti Ungkap Fakta Genetik Kucing Oranye

Setelah lebih dari 100 tahun lamanya, para peneliti akhirnya berhasil mengungkap asal usul kucing berbulu oranye. Temuan ini berasal dari identifikasi mutasi genetik yang terletak pada kromosom X dalam peta genom seekor kucing.

Mayoritas kucing berbulu oranye berjenis kelamin jantan. Hal ini karena kucing jantan hanya memiliki satu kromosom X, sementara yang satunya adalah kromosom Y. Jika kromosom X tersebut membawa mutasi yang memicu warna oranye, maka seluruh bulu kucing jantan akan tampak oranye secara menyeluruh.

Kucing betina memiliki dua kromosom X – dan sangat tidak mungkin keduanya akan membawa mutasi bulu oranye, oleh karena itu hanya ada sedikit kucing betina yang sepenuhnya berwarna oranye.

Namun, mereka mungkin masih membawa mutasi tersebut pada salah satunya, yang menyebabkan beberapa kucing betina memiliki bulu belang-belang oranye atau bulu bercak kura-kura.

"Corak merah dan hitam ini terbentuk karena, pada awal perkembangan, satu kromosom X di setiap sel dimatikan secara acak," jelas ahli genetika Universitas Kyushu sekaligus penulis utama penelitian, Hiroyuki Sasaki dalam sebuah pernyataan dilansir IFL Science.

"Saat sel membelah, mereka menciptakan area dengan gen

warna bulu aktif yang berbeda, sehingga menghasilkan corak warna kulit yang berbeda."

Bulu oranye muncul akibat aktivitas penghapusan kecil di wilayah non-coding gen ARHGAP36. Perubahan kecil ini tidak memengaruhi protein yang dikodekan oleh gen tersebut, hanya saja aktivitasnya yang meningkat.

Menariknya, ARHGAP36 tidak diekspresikan dalam sel pada pigmen tikus, sel

pigmen manusia, atau sel pigmen kucing dari kucing non-oranye," kata Christopher Kaelin, ilmuwan senior genetika di Stanford Medicine dan penulis utama studilainnya.

"Mutasi pada kucing oranye mengaktifkan ekspresi ARGHAP36

dalam jenis sel, sel pigmen yang biasanya tidak diekspresikan."

Sasaki dan tim berikutnya akan mempelajari fungsi ARHGAP36 pada tingkat molekuler. Hal itu berguna tidak hanya untuk menelusuri awal

mula bulu kucing bermutasi jadi oranye, tetapi juga mengidentifikasi keberadaannya pada manusia, karena kita juga memiliki gen ini.

Kapan dan di mana mutasi pada ARHGAP36 muncul? "Ini adalah sesuatu yang muncul pada kucing domestik, mungkin pada awal proses domestikasi," kata Kaelin.

"Kami tahu itu karena ada lukisan yang berasal dari abad ke-12 yang memperlihatkan gambar kucing calico yang jelas. Jadi, mutasi ini sudah cukup lama." (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL.

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenalan wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenalan wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenalan atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

High Heels Ini Bikin Kaki Lebar Terlihat Ramping

Mencari high heels yang cocok untuk pemilik kaki lebar bisa menjadi perjalanan panjang dan cukup menantang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar model high heels di pasaran dirancang dengan ujung depan yang runcing atau lancip. Desain ini memang ditujukan untuk menciptakan ilusi kaki yang tampak lebih ramping dan jenjang, tetapi sayangnya tidak ramah bagi pemilik khaki lebar.

Sepatu dengan bentuk seperti ini sering kali terasa sempit, menekan bagian jari, dan menyebabkan ketidaknyamanan bahkan dalam waktu singkat pemakaian. Akibatnya, banyak orang dengan kaki lebar harus meluangkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk menemukan sepatu hak

tinggi yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga nyaman dan mendukung bentuk kaki mereka secara optimal.

Kabar baiknya, dunia fashion kini semakin inklusif terhadap berbagai bentuk kaki, termasuk kaki yang lebih lebar. Saat ini, sudah banyak produsen sepatu dan desainer yang menghadirkan koleksi high heels dengan desain yang tidak hanya menawan secara visual, tetapi juga mempertimbangkan kenyamanan pemakainya.

Model-model terbaru ini dirancang dengan potongan lebih lebar di bagian depan, bantalan yang lebih empuk, serta bahan yang lebih fleksibel agar dapat menyesuaikan bentuk kaki tanpa menimbulkan rasa sakit. Jadi, bagi kamu yang selama ini kesulitan menemukan sepatu hak tinggi yang pas dan nyaman, kini ada lebih banyak pilihan yang bisa kamu pertimbangkan.

Berikut beberapa model high heels yang cocok untuk khaki lebar.

High Heels Strap

Sesuai namanya, high heels strap memiliki tali lebar atau strap di punggung kaki. Strap itu bisa disesuaikan dengan ukuran kaki sehingga menciptakan rasa nyaman. Biasanya high heels strap memiliki platform atau hak yang lebih rendah sehingga kaki tidak mudah pegal saat memakainya.

Tali atau strap pada High Heels Strap bisa memiliki berbagai desain, seperti tali yang mengikat pada ikatan kaki, tali yang memegang punggung kaki, atau tali yang membentuk bentuk-bentuk tertentu.

Wedges

Wedges adalah high heels dengan ciri khas sol yang tebal dan besar. Sepatu ini akan menopang kaki dengan baik dan stabil. Selain itu, modelnya bisa menyeimbangkan tampilan kaki yang lebar. Pilihan model wedges sangat beragam, mulai dari yang simpel hingga penuh aksesoris, jadi bisa kamu pilih sesuai kebutuhan.

Wedges dapat digunakan di berbagai acara, baik formal

maupun kasual, serta di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar ruangan.

High Heels Slingback

Ciri khas high heels slingback adalah strap di bagian belakang kaki yang adjustable. Jadi, meskipun bagian depannya agak lancip, keberadaan strap itu membantu kaki lebar untuk mendapatkan kenyamanan. High heels slingback umumnya didesain dengan hak yang runcing, tapi ada pula yang memiliki hak tebal. Nah, pemilik kaki lebar sebaiknya memilih model dengan hak tebal agar langkah lebih stabil. Jenis heels yang satu ini sangat cocok untuk dipakai ke acara formal maupun semi-formal.

Heels jenis ini biasanya memiliki hak sedang dan sering kali dilengkapi dengan aksesoris seperti brokat, pita, atau kristal. Detail tersebut menambah nilai artistik tanpa membuat sepatu tampak berlebihan. Slingback heels juga praktis karena mudah dipakai dan dilepas, sehingga banyak dipilih oleh wanita aktif yang ingin tetap tampil menawan tanpa repot.

High Heels Bertali

High heels bertali memiliki tampilan yang mirip dengan sandal bertali, tapi dilengkapi hak untuk membuat penggunaannya jadi lebih tinggi. Talinya melilit hingga pergelangan kaki dan menciptakan kesan feminin. Tali pada high heels ini berfungsi untuk mengencangkan sepatu di kaki, memberikan dukungan dan kenyamanan, serta menambah estetika.

Selain itu, bagian depannya tidak tertutup sehingga membebaskan

jari-jari kakimu untuk bernapas. Jenis heels ini akan memberikan tampilan kasual yang cocok dipakai ke acara santai.

Toms Cutout High Heels

Toms cutout high heels juga memiliki ciri khas strap kain di bagian depan dan punggung kaki. Namun, bagian jari-jari tetap terbuka sehingga kaki yang lebar akan merasa nyaman. Sebenarnya, alas kaki ini lebih mirip sandal yang dilengkapi hak rendah. Cocok untuk kamu yang belum terbiasa memakai heels

High Heels Tali Silang

Jika kamu mencari alas kaki yang cukup tinggi dengan hak tipis, pilihlah high heels dengan tali menyilang. Aksesoris tali akan membuat siluet kaki lebih ramping, serta menciptakan tampilan yang feminin. Model sepatu yang klasik ini bisa dipadukan dengan outfit kasual maupun formal. (nei,ist/dya)



Prabowo Ganti (dari Hal 1)...

Presiden RI Prabowo Subianto dilaporkan telah menunjuk dua orang untuk mengisi kursi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Dirjen Bea Cukai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Setelah menggelar rapat dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (20/5/2025), Komisaris PT Phapros Tbk Bimo Wijayanto mengungkapkan, dirinya dan Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama telah menerima mandat untuk bergabung dalam jajaran Kemenkeu.

"Saya diberikan mandat nanti, sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kemenkeu, begitu juga dengan Letjen Djaka. Untuk pelantikan dan segala macam menunggu arahan dari Bu Menkeu," ujarnya kepada awak media.

Meski tidak secara terbuka mengumumkan jabatan yang diampu, Bimo sebelumnya telah diisukan akan menggantikan Dirjen Pajak Suryo Utomo. Sementara Letjen Djaka akan menggantikan posisi Dirjen Bea Cukai Askolani.

Dalam pertemuannya dengan Presiden RI, Bimo juga mendapat arahan strategis terkait reformasi sistem perpajakan dan penguatan penerimaan negara.

"Beliau (Prabowo) memberikan banyak arahan, beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara," papar Bimo.

Selain itu, Bimo juga mengaku akan mempercepat pembenahan sistem perpajakan Coretax supaya bisa memberikan kepastian pelayanan kepada wajib pajak.

Ketika ditanya kapan pelantikan dilakukan, Bimo mengatakan dirinya masih menunggu arahan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tetapi ia memberikan sedikit bocoran tentang kemungkinan pelantikan dilakukan pekan ini. "Secepatnya. Mungkin minggu ini, mungkin," tandasnya.

Penggantian Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres). Dapat pula melalui Menteri Keuangan (Menkeu) mengajukan calon pejabat baru, dan presiden kemudian menerbitkan Keppres untuk pelantikan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini yaitu Suryo Utomo enggan komentar saat dikonfirmasi. "Aku enggak komentar macem-macam, ya. Nanti akan diumumkan," ujarnya kepada awak

media, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

Pengumuman lebih lanjut soal rotasi pejabat Kemenkeu juga diungkap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. Meski begitu, saat dikonfirmasi terkait nama-nama calon kuat Dirjen Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai, dia memilih untuk tidak menjawab.

"Pasti diumumkan. Nanti akan diumumkan (nama-nama pejabat baru kalau ada pelantikan)," kata Suahasil, usai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.

Sementara itu, Menkeu, Sri Mulyani juga memilih untuk tidak berkomentar terkait kabar yang beredar belakangan terkait pergantian Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai.

Sementara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu tak membantah ataupun membenarkan kabar tersebut. Dia mengaku sedang berada di luar negeri, sehingga tak memiliki informasi terbaru terkait kementeriannya.

"Saya lagi di luar negeri acara IsDB (Islamic Development Bank) Meeting sejak Jumat dan kurang ter-update," kata Anggito.

Letjen TNI Djaka Budhi Utama kini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024. Sebelum itu, dia

sempat menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemenhan). Penunjukkan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI pada 14 Juni 2024.

Kopassus jebolan Akademi Militer (Akml) tahun 1990 ini juga pernah menjadi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tahun 2021-2023.

Sementara itu, Bimo Wijayanto pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputan II Kantor Staf Presiden. Sebelumnya, dia dikenal sebagai Asisten Deputy (Asdep) Investasi Strategis pada Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bimo Wijayanto di bawah Luhut Binsar Panjaitan.

Tugas Berat Menanti

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengungkapkan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai memiliki tugas berat untuk memenuhi target penerimaan perpajakan, dengan mendisiplinkan para wajib pajak dan wajib cukai untuk membayar kewajiban sesuai aturan.

"Masih banyak pelanggaran akibat budaya compliance (kepatuhan) yang buruk, dan pelanggaran kakap oleh mereka yang mengaku punya backing (dukungan)," ujar Wijayanto.

Dia menegaskan siapapun tokoh yang menempati jabatan sebagai Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai tidak akan berhasil memenuhi target kinerjanya tanpa dukungan berupa penegakan hukum oleh pemerintah.

"Aparat penegak hukum juga perlu serius membantu kedua pejabat tersebut," kata Wijayanto.

Dia memaparkan tantangan utama Dirjen pajak antara lain memperluas basis pajak, mempercepat perbaikan sistem pajak digital Coretax, dan memperbaiki compliance.

Selain itu, memberantas ekonomi underground (bawah tanah), dan mewujudkan kebijakan perpajakan yang sederhana, tetapi optimal bagi penerimaan.

Sementara itu, tantangan utama Dirjen Bea Cukai dalam menjalankan tugasnya ialah: Memberantas penyelundupan dan praktik cukai palsu atau produk tanpa cukai di berbagai sektor. Kemudian, menyederhanakan proses administrasi dan tata kelola di pelabuhan, bekerja sama dengan lintas kementerian dan aparat penegak hukum. Selain itu, mewujudkan kebijakan cukai yang sederhana tetapi optimal bagi penerimaan negara.

Maka itu, Wijayanto menilai sosok yang menjadi Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai sebaiknya memenuhi empat kriteria, yakni profesional, bersih, mau mendengar, dan tegas. (wid,ist,rls,tam,blo/dya)

Kabar Buruk Diungkap Sri Mulyani

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi dunia akan terus dibayangi ketidakpastian. Hal itu terjadi akibat persaingan dan perang ekonomi, perang dagang, hingga perang militer antar negara.

"Dunia akan terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan perang ekonomi, perang dagang, perang keuangan dan bahkan perang militer antar negara," kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III, Selasa (20/5/2025).

Sri Mulyani menyebut perang dagang yang eskalatif dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun. Jika dibandingkan dengan data di triwulan yang sama tahun lalu, beberapa negara sudah mulai mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan I tahun ini.

"Korea Selatan mengalami kontraksi 0,1% year on year, ini adalah pertama kali sejak COVID tahun 2020 terjadi. Malaysia yang pada triwulan IV-2024 sempat tumbuh 4,9%, pada triwulan I-2025

hanya tumbuh 4,4%. Singapura yang menjadi hub dari perdagangan dan investasi global mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan dari triwulan sebelumnya tumbuh 5% menjadi hanya 3,8% year on year," beber Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut globalisasi dan semangat kerja sama antar negara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit di semua segi. Blok kesepakatan perdagangan dan investasi yang dibangun antar negara disebut telah ditinggalkan dan tidak lagi dihormati.

"Proteksionisme dan orientasi inward looking serta prinsip my country first telah mengancam dan menghancurkan kerja sama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak pasca Perang Dunia II yang dibangun dan didominasi oleh negara-negara Barat dalam hal ini Amerika Serikat," tutur Sri Mulyani.

Pada akhirnya situasi ini menciptakan gangguan rantai pasok global yang menjadi andalan dan fondasi bagi sistem ekonomi. Volatilitas dan ketidakpastian global ini turut melemahkan kegiatan

ekspor-impor, serta mendorong aliran modal keluar (capital outflow) yang pada gilirannya mengancam stabilitas nilai tukar, meningkatkan tekanan inflasi dan menyebabkan suku bunga global tetap tinggi.

Terkait kebijakan tarif resiprok yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengingatkan Sri Mulyani pada kondisi 125 tahun lalu. Dalam kondisi ini, peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang diciptakan sebagai tempat negosiasi dispute/ persengketaan dagang antar negara secara de facto disebut tidak berjalan.

"Kebijakan pengenaan tarif resiprok oleh AS kepada 145 negara mitra dagangnya yang diumumkan Presiden Trump pada 2 April 2025, dapat dibandingkan atau setara dengan tingkat tarif ekstrem tinggi yang dilakukan AS 125 tahun lalu. Jarum sejarah dunia seakan berputar balik mundur satu abad ke belakang di AS, atau bahkan mundur ke abad 16-18 sewaktu kebijakan Merkantilisme mendominasi dunia. Situasi ini memicu berbagai perubahan tatanan sosial, politik dan ekonomi di berbagai negara," ungkap Sri Mulyani. (wid,dtc,ist/dya)



Hari Jadi Kota Surabaya ke-732

PIMPINAN DPRD TEKANKAN PENTINGNYA SDM UNGGUL HINGGA PEMERATAAN INFRASTRUKTUR



Wakil DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai (tengah) menemui masyarakat di masa reses untuk mendengarkan masukan dan saran terkait Kota Surabaya. (Istimewa)

SURABAYA- Di usia ke-732 tahun, Kota Surabaya diharapkan terus meneguhkan komitmennya dalam menyejahterakan masyarakat. Salah satu pimpinan DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai menyampaikan sejumlah usulan dan evaluasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) agar Kota Pahlawan lebih baik lagi.

Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menekankan pentingnya penyelesaian pekerjaan rumah (PR) yang masih tertunda. Mulai dari banjir, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan publik dan digitalisasi pemerintahan.

"Saya berharap ke depan pemerintah kota bisa menyelesaikan PR-PR yang selama ini belum terselesaikan. Terutama penanganan banjir dan peningkatan kualitas pendidikan, tentu untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul," ucap Bahtiyar ketika dihubungi Lentera, Senin (20/5/2025).

Salah satu sorotan utama Bahtiyar adalah perlunya pemberian beasiswa kepada pelajar tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi melalui skema Beasiswa Pemuda Tangguh. Menurutnya, hal ini bisa menjadi hadiah spesial bagi generasi muda Surabaya di momen HJKS ke-732.

"Walaupun kewenangan SMA dan SMK ada di provinsi, saya harap Surabaya bisa memberi kado istimewa berupa penambahan kuota beasiswa Pemuda Tangguh agar bisa meringankan beban orangtua siswa," tuturnya.

Tak hanya di bidang pendidikan,

politisi dari Fraksi Gerindra ini juga menyoroti pemerataan pembangunan dan penguatan digitalisasi.

Dalam hal infrastruktur, Bahtiyar menilai pembangunan di pusat kota sudah cukup baik, namun ia menyoroti perlunya pemerataan hingga wilayah perkampungan. Sehingga seluruh warga merasakan dampak pembangunan secara merata.

Ia juga mengapresiasi program digitalisasi layanan publik yang telah dikembangkan Pemkot Surabaya. Menurutnya, Surabaya berpotensi menjadi pionir dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis digital secara utuh di Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan visi Kota Surabaya yakni Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan.

"Digitalisasi kita sudah bagus, tinggal penguatan SDM agar lebih memahami sistem dan bisa melayani masyarakat dengan optimal, khususnya di level kelurahan dan kecamatan," jelasnya.

Menurut Bahtiyar memang masih adanya kendala di lapangan yang berkaitan dengan kapasitas SDM. Ia berharap pelatihan dan pemahaman mendalam diberikan agar petugas, terutama di tingkat RW dan kelurahan, bisa memberikan layanan prima kepada masyarakat.

Tantangan Klasik Lapangan Kerja

Di bidang ekonomi, Bahtiyar mengakui tantangan klasik masih menghantui Surabaya. Ia menyoroti perlunya kolaborasi antara Pemkot dan perusahaan swasta untuk membuka lapangan kerja bagi warga ber-KTP Surabaya.

"Warga Surabaya harus menjadi tuan rumah di kota sendiri," tegasnya.

Ia juga mendorong adanya pendampingan terhadap pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Sehingga UMKM di bidang ini memiliki akses pasar dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Di samping itu, Bahtiyar juga memberikan catatan terhadap rencana pembentukan 'Kabinet Surabaya Berkah' oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ia me-nekankan

pentingnya penempatan pejabat berdasarkan kapasitas dan kompetensi.

"Saya harap para pejabat yang dilantik nanti benar-benar menjalankan komitmen yang disampaikan saat

lelang jabatan. Ini penting demi pelayanan terbaik bagi warga," pesannya.

Momen HJKS ke-732 ini, diharapkan menjadi momentum untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang semakin maju dan humanis.

"Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia. Saya harap kita bisa jadi pijakan atau referensi bagi kota lain di Indonesia ke depannya," tutupnya. (adv,ama/dya)



Walaupun kewenangan SMA dan SMK ada di provinsi, saya harap Surabaya bisa memberi kado istimewa berupa penambahan kuota beasiswa Pemuda Tangguh agar bisa meringankan beban orangtua siswa."

BAHTIYAR RIFAI

Wakil Ketua DPRD Surabaya

